



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 2 Januari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
UNIT KERJA : BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI GORONTALO

I. DATA PRIBADI

1. Nama : NIKSON ENTENGO
2. Jabatan : KEPALA SEKRETARIAT
3. NHK : 402830

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **1.622.500.000**

1. Tanah Seluas 495 m2 di KAB / KOTA BONE BOLANGO, Rp. 85.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 525 m2/139 m2 di KAB / KOTA GORONTALO, HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000
3. Tanah Seluas 3.684 m2 di KAB / KOTA BONE BOLANGO, HASIL SENDIRI , Rp. 195.000.000
4. Tanah Seluas 947 m2 di KAB / KOTA BONE BOLANGO, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 947 m2/319 m2 di KAB / KOTA BONE BOLANGO, HASIL SENDIRI Rp. 700.000.000
6. Tanah Seluas 2.106 m2 di KAB / KOTA GORONTALO, HASIL SENDIRI Rp. 42.500.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **237.000.000**

1. MOBIL, HONDA CRV Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 190.000.000
2. MOTOR, YAMAHA MIO Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 6.000.000
3. MOTOR, YAMAHA B6H/AT Tahun 2024, HASIL SENDIRI Rp. 41.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp.** **214.500.000**



D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	95.199.538
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	2.169.199.538
III. HUTANG	Rp.	397.378.671
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	1.771.820.867

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.